

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perekonomian suatu daerah perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah demi mewujudkan perekonomian daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Seiring dengan peranan Pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerahnya sendiri dalam upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan setiap daerah guna meningkatkan perkembangan daerah dengan maksimal, agar tidak terjadi krisis moneter yang menyebabkan kondisi perekonomian menjadi tidak stabil. Pengurusan keuangan di pemerintah daerah diatur dengan membagi menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pemerintah daerah memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus. APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan daerah, keuangan pemda, dimana ada satu pihak yang memberikan gambaran mengenai perkiraan pengeluaran dalam membiayai kegiatan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran (Halim, 2014 : 35).

Pentingnya pengawasan mengenai pelaksanaan APBD perlu diperhatikan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga dana yang ada dapat digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Menurut UU No. 23 tahun 2014 mengenai tugas DPRD dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD. Pengawasan diarahkan seluruhnya untuk mencegah adanya kecurangan terhadap tujuan yang ingin

dicapai. Pengawasan dilakukan dengan harapan dapat mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi (Kinasih: 2013). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan anggaran oleh dewan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi pengawasan secara langsung seperti halnya mengenai pengetahuan dewan tentang anggaran. Faktor kedua yang mempengaruhi adalah faktor eksternal yang merupakan faktor yang datang dari pihak luar yang akan memperkuat atau memperlemah anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya adalah komitmen organisasi.

Pentingnya peranan semua pihak dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan demi kepentingan masyarakat. Setiap anggota dewan harus berperan dalam melaksanakan tugas, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Komitmen keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat diperlukan agar *good governance* dapat terwujud dan berjalan dengan baik (Mayasari: 2012). *Good governance* yang efektif menuntut terciptanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini merupakan indikator pemerintahan yang demokratis guna upaya membangun ekonomi kerakyatan. Adanya komitmen organisasi dalam pengawasan APBD merupakan indikator mewujudkan *good governance*. Dalam hal ini berkaitan dengan kinerja anggota dewan di DPRD, komitmen organisasi sangat perlu untuk pengawasan APBD yang baik. Pengawasan yang dilakukan harus dimulai sejak tahap perencanaan anggaran, pengesahan, pelaksanaan serta pelaporan. Hal ini karena DPRD mempunyai kewenangan dalam menentukan tujuan dan kebijakan umum APBD (RKUA). Namun anggota DPRD harus memahami bahwa

pengawasan terhadap eksekutif daerah sebatas pengawasan bukan pemeriksaan. Pentingnya pengawasan APBD dalam menangani kecurangan dalam penggunaan dana. Dana yang ada harus dialokasikan secara maksimal demi kepentingan rakyat tanpa adanya unsur kecurangan. Pengawasan APBD secara maksimal dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam lingkup pembangunan satu wilayah. Pembangunan beberapa fasilitas umum seperti jalan, jembatan maupun lainnya membutuhkan penilaian secara bijak dari pemerintah agar dalam penyusunan anggaran sesuai dengan realisasinya. Dengan Otonomi daerah proyek pembangunan wilayah dapat di handle penuh oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu sangat rawan terhadap kepentingan kelompok yang memanfaatkan anggaran sebagai umpan untuk tindakan berbagai kecurangan. Keterlibatan anggota dewan dalam pengawasan anggaran daerah sebagai controlling yang benar dan memberikan kontribusi untuk upaya mewujudkan pemerintah daerah yang terbuka (Coryanata : 2011).

Pentingnya pengetahuan anggaran bagi setiap anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan APBD. Apabila semua anggota dewan sudah mempunyai pengetahuan anggaran maka pengawasan dapat terlaksana secara maksimal. Pengetahuan anggaran sangat diperlukan untuk pengawasan APBD dapat terlaksana secara terbuka. Anggota dewan harus mampu memahami substansi dan arah kebijakan yang terdapat dalam APBD. Yudoyono dalam Coryanata (2011) DPRD bisa menggunakan hak-haknya sesuai aturan, melaksanakan tugas dan kewajiban serta menyesuaikan jabatannya secara profesional, apabila setiap anggota mempunyai pengetahuan dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik.

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan Pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan mengenai anggaran. Anggota dewan diharapkan dapat mendeteksi adanya penyimpangan dan kecurangan

penggunaan anggaran melalui pengetahuan tentang anggaran. Pengetahuan tentang anggaran yang dimiliki anggota dewan dapat digunakan dalam menganalisis perbandingan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBD.

Pentingnya komitmen organisasi dalam peningkatan kinerja anggota dewan. Setiap anggota dewan diharapkan mempunyai komitmen organisasi yang tinggi sehingga kinerja anggota dewan dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat. Kinerja anggota dewan dalam pengawasan APBD dapat terwujud secara optimal jika didukung adanya komitmen semua individu dalam organisasi. Menurut Robbins (2014) Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual saat menjalankan operasional organisasi. Anggota dewan akan menggunakan pengetahuan anggaran yang dimiliki dalam melakukan pengawasan apabila anggota dewan tersebut mempunyai komitmen organisasi yang tinggi.

Ada beberapa kasus dalam pengawasan APBD yang menjadi perhatian semua pihak, salah satunya adalah ketidaksesuaian APBD yang tertulis dengan APBD yang direalisasikan. Seperti halnya yang terjadi di Sidoarjo, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2017 Kabupaten Sidoarjo masih menjadi polemik di eksekutif dan legislatif. APBD yang sudah disetujui Gubernur Jawa Timur Soekarwo itu tiba-tiba berubah angka, dari yang sebelumnya Rp 4,18 triliun menjadi Rp4,26 triliun (metrotvnews.com). Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan keuangan APBD dengan Komitmen Organisasi (Study empiris pada DPRD Kabupaten Sidoarjo)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah ?
2. Apakah Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah ?
3. Apakah Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah ?
4. Apakah Komitmen anggota Dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah ?
5. Pengetahuan dewan tentang anggaran, Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Daerah dan komitmen anggota dewan secara bersama-sama mempengaruhi pengawasan anggota Dewan ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Komitmen anggota Dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengetahuan dewan tentang anggaran, Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Daerah dan komitmen anggota dewan secara bersama-sama mempengaruhi pengawasan anggota Dewan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai alat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh peneliti dari perguruan tinggi yang telah ditempuhnya, sedangkan bagi mahasiswa yang lain khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika dan Perguruan Tinggi lainnya dapat dijadikan sebagai dasar penelitian terdahulu untuk penelitian sejenis, dan sebagai acuan untuk meneliti variabel yang lain.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khasanah dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi dan menambah pengetahuan serta studi kepustakaan khususnya dalam menganalisis Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan APBD Dengan Komitmen Organisasi (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Sidoarjo).

3. Aspek Praktis

Dengan dilakukan penelitian ini dapat bermanfaat langsung bagi objek yang diteliti yaitu anggota DPRD Sidoarjo, memberikan solusi bagi permasalahan yang ada pada Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta komitmen Terhadap Pengawasan Keuangan APBD (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Sidoarjo) pada khususnya. Dan dapat bermanfaat bagi instansi

yang sama pada umumnya. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini menginformasikan tentang keberadaan anggota DPRD Sidoarjo, dan dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah bagi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik.